

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM
PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR PADA PEMILU
LEGISLATIF DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024**

Nilhakim

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nilhakim30@gmail.com

Wiwini Guanti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

Reno

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: reno.07111999@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the effectiveness of political education implementation by the Golkar Party in influencing vote acquisition in the Legislative Elections in Sambas Regency in 2024. Indonesia, as a democratic country, places political parties as a central pillar in national life. As democracy develops, political education becomes a crucial factor in increasing public awareness and participation. The Golkar Party, as one of the oldest and largest political parties in Indonesia, has a responsibility to provide effective political education so citizens understand their rights and obligations. However, the party's vote share in Sambas Regency decreased from 33,817 votes in 2019 to 31,784 votes in 2024. This study employs a qualitative method with an empirical juridical approach, examining Law Number 2 of 2011 on Political Parties alongside field data gathered through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that political education activities have been carried out formally but have not been fully effective in influencing voter behavior. Key limiting factors include limited human resources and party budgets, low public political awareness, suboptimal political communication strategies, and constituency fragmentation.

Keywords: Effectiveness, Political Education, Golkar Party, Legislative Elections, Sambas Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar dalam mempengaruhi perolehan suara pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas Tahun 2024. Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring berkembangnya sistem demokrasi, pendidikan politik menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat. Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan politik yang efektif. Namun, perolehan suara Golkar di Kabupaten Sambas mengalami penurunan dari 33.817 suara pada tahun 2019 menjadi 31.784 suara pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta kondisi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politik telah berjalan secara formal namun belum efektif mempengaruhi perilaku pemilih. Faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran politik masyarakat, strategi komunikasi yang belum optimal, dan fragmentasi Dapil.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendidikan Politik, Partai Golkar, Pemilu Legislatif, Kabupaten Sambas.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan negara, di mana rakyat memiliki peran sentral tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang secara aktif terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik, dan kedaulatan tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme partisipatif, salah satunya adalah pemilihan umum (pemilu) yang menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal untuk pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi suatu negara, yang keberhasilannya tidak semata-mata diukur dari terlaksananya tahapan administratif dan teknis sesuai peraturan yang berlaku, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat serta kualitas pemahaman politik warga negara dalam menentukan pilihannya secara rasional dan bertanggung jawab (Budiardjo, 2021).

Salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat adalah pendidikan politik. Pendidikan politik berperan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses pendidikan politik yang terarah dan berkelanjutan, masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur dalam sistem politik, tetapi juga memahami nilai-nilai demokrasi, pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta kesadaran akan peran mereka dalam mengawal kebijakan publik. Dengan adanya pendidikan politik yang baik, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan politik secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab, serta tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat, informasi yang menyesatkan, maupun praktik-praktik politik yang bersifat manipulatif (Haris, 2019).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi karena menjadi salah satu pilar utama yang menopang berjalannya sistem politik yang sehat dan berkelanjutan. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga sebagai media sosialisasi politik yang memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma, serta proses dalam kehidupan politik. Selain itu, partai politik berperan dalam melakukan rekrutmen politik dengan menjaring, membina, dan menyeleksi kader-kader terbaik untuk menduduki jabatan publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai politik juga berfungsi sebagai pengatur konflik dengan mengelola berbagai perbedaan kepentingan yang muncul di tengah masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak stabilitas politik. Melalui berbagai fungsi tersebut, partai politik menjadi penghubung yang strategis antara masyarakat dengan pemerintah sekaligus memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kualitas pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi (Budiardjo, 2021).

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi partai politik adalah melalui kegiatan pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan demokrasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman yang sistematis mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup upaya pembentukan sikap, perilaku, dan orientasi politik masyarakat agar lebih kritis, rasional, serta partisipatif dalam menghadapi berbagai dinamika politik. Melalui kegiatan pendidikan politik yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses politik serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap kegiatan politik, khususnya dalam pemilihan umum. Dengan demikian, partai politik memiliki kewajiban yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi politik, serta menciptakan kehidupan politik yang lebih sehat dan bertanggung jawab (Asshiddiqie, 2020).

Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan peran yang signifikan dalam dinamika politik nasional. Sejak masa Orde Baru, Partai Golkar dikenal sebagai kekuatan politik dominan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, dan meskipun memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan sistem politik yang lebih demokratis dan kompetitif, Partai Golkar tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu partai politik utama di Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi Partai Golkar terhadap perubahan politik serta konsistensinya dalam mengikuti perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Di tingkat daerah,

termasuk di Kabupaten Sambas, Partai Golkar juga memiliki basis massa yang cukup kuat serta jaringan organisasi yang luas hingga ke tingkat akar rumput. Selain itu, Partai Golkar aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga. Melalui berbagai upaya tersebut, Partai Golkar berperan dalam membentuk pemahaman politik masyarakat sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan politik yang berpengaruh di tingkat lokal maupun nasional (Ambardi, 2009).

Namun demikian, data hasil pemilu menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Sambas mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir. Pada Pemilu Legislatif tahun 2019, Partai Golkar berhasil memperoleh sebanyak 33.817 suara sah, namun pada Pemilu Legislatif tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 31.784 suara sah. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan preferensi politik masyarakat serta meningkatnya tingkat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan dukungan pemilih di daerah tersebut. Di sisi lain, beberapa partai politik lain seperti Gerindra dan NasDem justru menunjukkan tren yang berbeda dengan mengalami peningkatan perolehan suara yang cukup signifikan. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika politik yang semakin kompetitif, di mana partai-partai politik berlomba-lomba untuk menarik simpati dan kepercayaan masyarakat melalui berbagai strategi, termasuk penguatan basis massa, kampanye politik, serta pelaksanaan program-program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (KPU Kabupaten Sambas, 2024).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang mendasar mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat, khususnya dalam konteks menurunnya perolehan suara pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas. Hal ini penting untuk dikaji karena pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik seharusnya mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta loyalitas masyarakat terhadap partai, sehingga berdampak pada peningkatan dukungan elektoral. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah kegiatan pendidikan politik yang telah dilaksanakan benar-benar berjalan secara efektif atau masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar dalam mempengaruhi perolehan suara pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas Tahun 2024, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut, baik yang berasal dari internal partai maupun dari kondisi eksternal masyarakat dan dinamika politik yang berkembang (Arifin Rahman, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2007). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), sehingga peneliti berupaya memahami fenomena secara menyeluruh tanpa memisahkannya ke dalam variabel-variabel yang kaku. Dalam metode ini, peneliti menjadi instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), tanpa adanya manipulasi terhadap situasi maupun kondisi objek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menggali bagaimana implementasi dan efektivitasnya dalam praktik, serta bagaimana respons dan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual mengenai hubungan antara aspek normatif hukum dan realitas empiris di lapangan.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta melihat kondisi nyata di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas, kader partai, dan masyarakat sebagai sasaran pendidikan politik. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan fakta yang tampak di lapangan (Silalahi, 2009).

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Mempengaruhi Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pendidikan politik didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran dan pemahaman yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi semata, tetapi juga sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan dalam membentuk sikap, perilaku, serta orientasi politik masyarakat agar lebih kritis, rasional, dan partisipatif dalam setiap proses demokrasi. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan mampu memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,

serta partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan demikian, definisi ini menjadi landasan normatif sekaligus acuan utama dalam menilai bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Golkar di Kabupaten Sambas dilakukan, baik dari segi metode, materi, maupun tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat serta kontribusinya terhadap perolehan suara dalam pemilu (Asshiddiqie, 2020).

Pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemilih guna mendorong kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara bijaksana, pelatihan kader sebagai upaya penguatan kapasitas internal partai agar mampu menjadi agen pendidikan politik yang efektif, dialog terbuka dengan masyarakat yang bertujuan untuk menampung aspirasi sekaligus memberikan ruang diskusi terkait isu-isu politik yang berkembang, serta pengenalan visi, misi, dan ideologi partai sebagai sarana membangun kedekatan emosional dan pemahaman ideologis antara partai dan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan secara merata di 7 daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Sambas, sehingga jangkauan pendidikan politik dapat mencakup berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, terdapat peningkatan intensitas pelaksanaan kegiatan dari 15 kali pertemuan pada Pemilu 2019 menjadi 20 kali pertemuan pada Pemilu 2024, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja dan keseriusan partai dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik. Secara formal, pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai dengan kewajiban partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa partai memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga negara, sehingga dalam konteks ini DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas dapat dinilai telah menjalankan fungsi normatifnya secara kelembagaan, meskipun efektivitasnya tetap perlu diukur dari dampak nyata terhadap perilaku politik masyarakat (DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas, 2024).

Meskipun berbagai kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan secara intensif dan terstruktur, data perolehan suara menunjukkan bahwa upaya tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan dukungan elektoral Partai Golkar di Kabupaten Sambas. Hal ini terlihat dari adanya penurunan jumlah suara yang diperoleh, yakni dari 33.817 suara pada Pemilu 2019 menjadi 31.784 suara pada Pemilu 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa peningkatan frekuensi kegiatan pendidikan politik tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan dukungan masyarakat dalam bentuk suara. Secara lebih rinci, penurunan suara tersebut terutama terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 dan Dapil 5, yang disebabkan oleh adanya pemecahan wilayah daerah pemilihan sehingga memicu terjadinya fragmentasi basis suara yang sebelumnya relatif

terkonsolidasi. Kondisi ini berdampak pada melemahnya kekuatan elektoral partai di wilayah tersebut karena suara pemilih terdistribusi ke lebih banyak kandidat maupun partai lain. Fenomena ini memperlihatkan bahwa efektivitas pendidikan politik tidak hanya ditentukan oleh kuantitas kegiatan yang dilakukan, tetapi juga oleh kualitas pendekatan, strategi komunikasi politik, serta kemampuan partai dalam membangun kepercayaan dan kedekatan dengan pemilih, sehingga dalam konteks ini pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Golkar di Kabupaten Sambas masih memerlukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh (KPU Kabupaten Sambas, 2024), sementara itu, partai-partai lain seperti Gerindra dan NasDem justru mengalami peningkatan perolehan suara yang cukup signifikan pada periode yang sama.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan secara prosedural dengan dampak nyata yang dihasilkan terhadap perubahan perilaku pemilih di lapangan. Meskipun kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal dan bahkan mengalami peningkatan dari segi intensitas, hal tersebut belum sepenuhnya mampu mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara signifikan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendidikan politik tidak hanya diukur dari seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana pesan yang disampaikan dapat dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai dasar dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan kata lain, aspek kualitas menjadi faktor yang sangat menentukan, termasuk metode komunikasi yang digunakan, relevansi materi dengan kebutuhan masyarakat, serta kemampuan partai dalam menjangkau kelompok sasaran secara tepat. Hal ini sejalan dengan temuan Arifin Rahman (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas pendidikan politik partai tidak semata-mata ditentukan oleh frekuensi kegiatan, melainkan lebih pada kualitas penyampaian pesan dan ketepatan sasaran yang dituju, sehingga tanpa adanya perbaikan pada aspek tersebut, pendidikan politik cenderung hanya bersifat formalitas dan belum mampu memberikan dampak elektoral yang optimal.

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Steers (1985), penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar di Kabupaten Sambas dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama yang menunjukkan tingkat keberhasilan program secara menyeluruh. Pertama, dari aspek capaian tujuan formal, pelaksanaan pendidikan politik dapat dikatakan telah terpenuhi karena kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan regulasi yang berlaku, sehingga secara administratif dan normatif partai telah menjalankan fungsinya dengan baik. Kedua, dari sisi partisipasi masyarakat, indikator ini belum sepenuhnya terpenuhi karena jangkauan kegiatan pendidikan politik masih terbatas pada kelompok atau wilayah tertentu, sehingga belum mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara merata. Ketiga, terkait perubahan pemahaman politik masyarakat, hasil yang dicapai bersifat parsial atau terpenuhi sebagian, yang berarti bahwa meskipun terdapat peningkatan kesadaran

politik pada sebagian masyarakat, namun dampaknya belum merata dan belum cukup kuat untuk membentuk perilaku politik yang konsisten. Keempat, dari segi pengaruh terhadap perolehan suara, indikator ini tidak terpenuhi, sebagaimana terlihat dari penurunan suara yang diperoleh partai, sehingga menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan belum efektif dalam meningkatkan dukungan elektoral. Kelima, dalam hal jangkauan wilayah, pelaksanaan kegiatan masih belum merata dan belum optimal karena terdapat daerah-daerah tertentu yang belum tersentuh secara maksimal oleh program pendidikan politik. Keenam, terkait stabilitas basis suara, khususnya di Dapil 3 dan Dapil 5, indikator ini juga tidak terpenuhi karena terjadi penurunan dan fragmentasi suara yang menunjukkan lemahnya konsolidasi basis pemilih di wilayah tersebut. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun secara formal pelaksanaan pendidikan politik telah berjalan, namun dari perspektif efektivitas substantif masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki agar tujuan peningkatan partisipasi dan dukungan politik dapat tercapai secara optimal.

Bentuk pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Golkar di Kabupaten Sambas meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, antara lain sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemilih sebagai upaya mendorong partisipasi yang sadar dan bertanggung jawab, pelatihan kader untuk memperkuat kapasitas internal partai agar mampu menjadi agen penyampai informasi politik yang efektif, dialog dan diskusi terbuka yang memberikan ruang interaksi langsung antara partai dan masyarakat, serta pengenalan ideologi partai guna membangun pemahaman dan kedekatan emosional dengan pemilih. Pendekatan ini pada dasarnya telah sejalan dengan teori pendidikan politik yang menekankan pentingnya kombinasi antara pendidikan formal, seperti pelatihan kader dan sosialisasi yang bersifat terstruktur, dengan pendidikan nonformal melalui dialog interaktif yang lebih partisipatif dan komunikatif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat (Sudjana, 2020). Melalui kombinasi tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga mampu terlibat aktif dalam proses diskusi dan pembentukan pemahaman politik yang lebih kritis. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pendidikan politik ini masih tergolong terbatas, terutama karena belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Keterbatasan ini terlihat jelas pada wilayah pedesaan dan daerah perbatasan yang masih memiliki hambatan dalam akses informasi, baik karena faktor geografis, infrastruktur, maupun keterbatasan media komunikasi, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat belum tersentuh secara optimal oleh program pendidikan politik yang dilaksanakan dan berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman serta partisipasi politik di wilayah tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Golkar di Kabupaten Sambas dapat dinilai telah berjalan dengan baik dari sisi formal dan kelembagaan, karena kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi fungsi normatif

partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Jika merujuk pada konsep efektivitas menurut Steers (1985), efektivitas organisasi diukur dari sejauh mana organisasi tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, meskipun Partai Golkar telah mengalokasikan sumber daya, melaksanakan berbagai program, dan meningkatkan intensitas kegiatan pendidikan politik, hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan perolehan suara dan memperkuat basis dukungan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam strategi pelaksanaan, baik dari segi metode pendekatan, kualitas komunikasi politik, maupun ketepatan sasaran program, sehingga kegiatan pendidikan politik yang dilakukan cenderung belum mampu mengubah preferensi politik masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar di Kabupaten Sambas telah memenuhi aspek formal kelembagaan, tetapi secara substantif masih belum efektif dalam mencapai tujuan elektoral yang diharapkan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar di Kabupaten Sambas, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Pertama, faktor internal partai yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Sambas adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh DPD Partai Golkar. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan partai dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan politik secara optimal. Jumlah kader yang terbatas serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama dalam memperluas jangkauan kegiatan, terutama untuk wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, seperti daerah pedesaan dan perbatasan. Di sisi lain, minimnya koordinasi antarstruktur partai, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa, turut menjadi hambatan dalam menciptakan keseragaman pelaksanaan program pendidikan politik. Kurangnya sinergi ini menyebabkan perbedaan dalam metode, intensitas, dan kualitas kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Akibatnya, terdapat ketimpangan pelaksanaan program, di mana beberapa wilayah mendapatkan perhatian lebih besar, sementara wilayah lainnya, khususnya di daerah perbatasan, belum terjangkau secara optimal oleh program pendidikan politik partai. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada tidak meratanya peningkatan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat,

sehingga tujuan pendidikan politik yang diharapkan belum dapat tercapai secara menyeluruh (DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas, 2024).

Kedua, faktor eksternal yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan politik adalah rendahnya tingkat partisipasi dan literasi politik masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah perbatasan di Kabupaten Sambas. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik cenderung rendah. Rendahnya partisipasi ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya minat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, tingkat pendidikan, serta kondisi geografis yang menghambat penyebaran informasi politik secara merata. Hal ini selaras dengan temuan Dewi Sartika (2022) yang menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sambas, masih tergolong rendah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mampu memahami dan mengolah informasi politik yang diterima secara kritis. Akibatnya, pesan-pesan yang disampaikan melalui kegiatan pendidikan politik tidak terserap secara optimal dan belum mampu membentuk pemahaman maupun sikap politik yang kuat, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas program pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap partai politik.

Ketiga, faktor strategi komunikasi politik yang belum optimal juga menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar di Kabupaten Sambas. Berdasarkan teori komunikasi politik yang dikemukakan oleh Lasswell (1936), efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh lima unsur utama, yaitu siapa komunikatornya, apa pesan yang disampaikan, melalui saluran apa pesan tersebut disalurkan, kepada siapa pesan ditujukan, serta efek yang dihasilkan dari komunikasi tersebut. Dalam praktiknya, Partai Golkar masih cenderung menggunakan pendekatan komunikasi konvensional yang bersifat tatap muka, seperti pertemuan langsung, sosialisasi, dan dialog terbuka, yang meskipun memiliki kelebihan dalam membangun kedekatan emosional, namun memiliki keterbatasan dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Di sisi lain, pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi dan pendidikan politik belum dilakukan secara optimal, padahal perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat, khususnya di kalangan pemilih muda yang semakin akrab dengan media sosial dan platform digital. Kondisi ini menyebabkan pesan-pesan politik yang disampaikan kurang mampu menjangkau segmen pemilih potensial secara efektif dan efisien. Hal tersebut diperkuat oleh temuan Muhammad Ridwan (2019) yang menyatakan bahwa strategi komunikasi politik Partai Golkar di Kabupaten Sambas belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak beralih ke media digital, sehingga diperlukan inovasi dan penyesuaian strategi komunikasi agar pendidikan politik dapat disampaikan

secara lebih luas, menarik, dan sesuai dengan karakteristik audiens yang dituju.

Keempat, faktor eksternal yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar di Kabupaten Sambas adalah meningkatnya tingkat persaingan antarpolitical politik yang semakin kompetitif. Dalam konteks Pemilu 2024, partai-partai lain seperti Gerindra dan NasDem menunjukkan kinerja yang lebih agresif dan terorganisir dalam menjalankan strategi kampanye, baik melalui pendekatan langsung kepada masyarakat maupun pemanfaatan berbagai media komunikasi yang lebih variatif dan modern. Strategi yang lebih terkoordinasi ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pemilih secara lebih luas dan efektif, termasuk menysasar segmen pemilih yang sebelumnya merupakan basis dukungan Partai Golkar. Akibatnya, terjadi pergeseran preferensi politik masyarakat yang berdampak pada berkurangnya dukungan terhadap Golkar. Kondisi ini semakin memperkuat dinamika persaingan politik yang tidak hanya menuntut partai untuk aktif melakukan pendidikan politik, tetapi juga mampu bersaing dalam hal strategi komunikasi, pendekatan kepada pemilih, serta kemampuan membangun citra dan kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, ruang pengaruh pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar menjadi semakin terbatas, karena harus berhadapan dengan berbagai narasi dan strategi dari partai lain yang lebih menarik dan relevan bagi pemilih. Oleh karena itu, meningkatnya persaingan antarpolitical menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan pendidikan politik dalam membentuk perilaku pemilih, khususnya di Kabupaten Sambas (KPU Kabupaten Sambas, 2024).

Berdasarkan analisis di atas, efektivitas pendidikan politik Partai Golkar di Kabupaten Sambas dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan program di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan politik yang lebih inovatif dan adaptif, khususnya melalui integrasi pendekatan digital untuk menjangkau pemilih muda yang semakin dominan. Di sisi lain, penguatan program *grassroot campaign* tetap penting agar partai dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, diharapkan pendidikan politik mampu meningkatkan partisipasi politik dan dukungan elektoral secara lebih optimal (Haryanto, 2019; Noor, 2019).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar dalam mempengaruhi perolehan suara pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar di Kabupaten Sambas telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 angka 4 secara formal. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, jangkauan wilayah yang luas, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan program pendidikan politik yang lebih terstruktur dan inovatif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, efektivitas pendidikan politik Partai Golkar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, kurang optimalnya strategi komunikasi partai, serta terjadinya pecah Dapil di beberapa wilayah yang menyebabkan basis suara terfragmentasi. Hal ini berdampak pada penurunan perolehan suara dari 33.817 suara pada Pemilu 2019 menjadi 31.784 suara pada Pemilu 2024.

Ketiga, pendidikan politik Partai Golkar telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk mencakup 7 Dapil, dengan jumlah pertemuan meningkat dari 15 kali pada Pemilu 2019 menjadi 20 kali pada Pemilu 2024. Meskipun intensitas meningkat, efektivitasnya belum optimal karena jangkauan yang tidak merata, rendahnya partisipasi masyarakat, dan pengaruh media sosial.

Keempat, Partai Golkar perlu memperkuat strategi komunikasi politik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, memperluas jangkauan pendidikan politik berbasis digital, meningkatkan intensitas kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk pendekatan langsung kepada masyarakat, dan menyusun strategi mitigasi terhadap pecah Dapil agar efektivitas pendidikan politik dapat lebih nyata dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, D. (2009). *Menjadi Golkar: Transformasi Organisasi dan Perubahan Politik di Indonesia*. LP3ES.
- Arifin Rahman. (2018). Efektivitas pendidikan politik partai politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1).
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Sartika. (2022). Implementasi pendidikan politik partai politik dalam meningkatkan literasi politik masyarakat di Kabupaten Landak. Universitas Tanjungpura.
- DPD Partai Golkar Kabupaten Sambas. (2024). *Profil dan Struktur Organisasi*. Sekretariat DPD Partai Golkar.
- Haris, S. (2019). Pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 14(2).
- Haryanto, A. (2019). *Partisipasi Politik dalam Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- KPU Kabupaten Sambas. (2024). *Data hasil penetapan perolehan suara partai politik Pemilu tahun 2019 dan 2024*. KPU Kabupaten Sambas.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. McGraw-Hill.
- Moloeng, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ridwan. (2019). Strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Sambas. STISIP Widyapuri Mandiri.
- Noor, F. (2019). *Partai Politik dan Pemilu di Indonesia: Dinamika dan Tantangan Demokrasi*. LIPI Press.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sudjana, N. (2020). *Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat*. Alfabeta.
- Tri Widodo & Sari Utami. (2020). Peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat: Perspektif demokrasi partisipatif. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 7(3).